

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Azis Muhammad Azzan Wahhab Sayyed Hawas, 2011, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (diterjemahkan oleh Abdul Majin Khon), Jakarta: Amzah,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2016)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992)
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Huzaemah Y. Tango, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001)
- Jimly Asshiddiqie dkk, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, (Malang: Setara Press, 2016)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Einar Grafika, 2009),
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Redika Aditama, 2016)
- Paisol Burlan, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015)

- Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977)
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-XVI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012)
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan ke-IV, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005),
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015)
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991)

B. JURNAL ILMIAH

- Ahmad Rifai, Ibnu Sodik, dan Abdul Muntholib, “*Sejarah Undang-undang Perkawinan Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*”, *Journal of Indonesian History*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Oktober 2015
- Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*”, *Al’ Adl*, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015
- Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*”, *Al’ Adl*, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2020

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP*”, Jurnal Yudisial Vol. 11, No. 1, April 2018

Enrico Simanjuntak, “*Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019

Fence M. Wantu, “*Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*”, Mimbar Hukum, Vol. 25, Nomor 2, Juni 2013

Firman Floranta Adonara, “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015

Joseph Dainow (Ed.), *The Role of Judicial Decisions and Doctrine in Civil Law and Mixed Jurisdictions*, (Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 1974)

Khiyaroh, “*Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan*”, Al-Qadha; Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Volume 7, Juni 2020, hal. 3

Linda Azizah, “*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*”, AL-ADALAH, Vol. 10, No. 4, Juli 2012

Meray Hendrik Mezak, “*Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, 2006

Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, 2013

C. HASIL PENELITIAN

Dora Dominica, “*Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Pengambilan Keputusan Oleh Direksi BUMN Persero Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*”, Skripsi, Tangerang: Fakultas Hukum Univeritas Pelita Harapan, 2021

Mikhael, “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat yang Diperjual-belikan Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat*”, Skripsi, Tangerang: Fakultas Hukum Univeritas Pelita Harapan, 2021

Mirja Fauzul Hamdi, “*Kedudukan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Merekonstruksi Hukum Acara*”, Makalah, Darusallam Banda-Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Azas *Nebis In Idem*

E. PUTUSAN

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/199

Putusan Nomor. 281/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mlg

F. KAMUS

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

G. WEBSITE

Danu Umbara, “Pancasila Sebagai *Philosophische Grondslag* dan Keududukan Pancasila dengan *Theorie Von Stafenubau der Rechtsordnung*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13144/Pancasila-Sebagai-Philosophische-Grondslag-Dan-Kedudukan-Pancasila-Dikaitkan-Dengan-Theorie-Von-Stafenufbau-Der-Rechtsordnung>, diakses 12 Desember 2021

Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum, Sumber Hukum Formal Bernama ‘Yurisprudensi’” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ad95871d1a/bahasa-hukum--sumber-hukum-formal-bernama-yurisprudensi>, diakses 1 Desember 2021

Susi Dwi Harijanti, “Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum”
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum>, diakses 19 Oktober 2021

